



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pertumbuhan jumlah pejalan kaki di Indonesia, terutama Daerah Ibukota Jakarta masih tergolong sedikit dibandingkan dengan penggunaan kendaraan bermotor. Dari segi transportasi, berjalan kaki merupakan salah satu moda transportasi di lalu lintas dan juga disebut sebagai perekat antarmoda. Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas lalu lintas untuk mempermudah dalam mencapai suatu tempat yang dituju, namun salah satu fasilitas lalu lintas seperti trotoar seringkali dijadikan tempat penyalahgunaan bagi para berkendara bermotor dan juga para Pedagang Kaki Lima (PKL), seperti dijadikan tempat parkir, alternatif jalan bagi pengendara sepeda motor, dan tempat berdagang PKL. Maka dari itu menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan ketidakamanan kepada para pejalan kaki, dan hak mereka direnggut dari fungsi trotoar itu sendiri yaitu tempatnya berjalan kaki untuk mencapai suatu tempat dan melakukan berbagai aktivitas lainnya dengan aman dan nyaman.

Pada laman milik Road Safety Association, [rsa.or.id](http://rsa.or.id) yang ditulis oleh Lucky (2014) mengenai Hasil Survey Keselamatan di Jalan, dikatakan oleh Ketua Umum RSA Indonesia, Edo Rusyanto bahwa sebanyak 84,58% masyarakat menganggap penegakkan hukum di lalu lintas masih belum tegas dan konsisten. Terdapat sebesar 12,93% masyarakat merasa penegak hukum sudah tegas dan konsisten, namun selebihnya yaitu 2,49% memilih tidak peduli, tidak tahu, dan

tidak menjawab. Survey yang dilakukan oleh RSA perihal prioritas mematuhi lalu lintas secara publik menunjukkan bahwa sebesar 72,43% masyarakat mematuhi lalu lintas saat adanya polisi lalu lintas, petugas dinas perhubungan, dan rambu lalu lintas. Berdasarkan survey diatas, masyarakat sangat minim dalam mematuhi lalu lintas sehingga lebih sering untuk melakukan pelanggaran kemudian berdampak juga dengan merugikan hak pengguna lalu lintas lainnya, seperti halnya pejalan kaki yang dirugikan oleh berkendara motor di trotoar karena dijadikan sebagai alternatif jalan pintas.

Pada laman otomania.com yang dituliskan oleh Nugroho (2017), bahwa jalan raya yang padat merupakan lingkungan yang berbahaya untuk pejalan kaki sehingga pemerintah menyediakan fasilitas berupa trotoar yang bebas dari aktivitas kendaraan bermotor. Pada saat terjadinya kemacetan, trotoar selama ini banyak dijadikan tempat parkir, berdagang, serta alternatif jalan pintas berkendara sepeda motor sehingga ini menjadi pelanggaran dan bentuk perampasan hak pejalan kaki. Sebagaimana hak pejalan kaki dilindungi dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. AKBP Budiyanto menjelaskan bahwa Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan berbagai upaya preventif, preventif, dan penegakkan hukum untuk melindungi hak pejalan kaki di trotoar. Dari data hasil yang didapat, dalam penegakkan hukum pelanggaran trotoar pejalan kaki selama pelaksanaan operasi dari Tanggal 17-21 Juli terdapat 5.644 pelanggaran. Namun faktanya, meskipun sudah dilakukan penegakkan hukum oleh Polantas, trotoar tetap disalahgunakan oleh para berkendara bermotor dan PKL.

Pada laman sebuah berita [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) yang dituliskan oleh Olivia (2017), bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan pada Bulan Agustus sebagai Bulan Tertib Trotoar (BTT) karena banyaknya pelanggaran di trotoar yang dilakukan oleh para pengendara sepeda motor, para juru parkir liar hingga PKL. Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko juga mengatakan bahwa terdapat dua kawasan dimana trotoar dialihkan fungsinya menjadi tempat parkir liar pengendara sepeda motor oleh juru parkir liar, yaitu Tanah Abang, dan Kota Tua. Dinas Perhubungan sudah bekerjasama dengan kelurahan dan kecamatan setempat untuk memasang spanduk peringatan di beberapa titik yang menjadi lokasi target pengoperasian. Dijelaskan oleh Bapak Sigit bahwa BTT ini mempunyai tujuan sebagai sebuah gerakan moral, dan para pengendara yang tertangkap telah melanggar peraturan saat pengoperasian akan dikenakan sanksi.

Penulis menyimak pada kanal Youtube Berita Satu TV dalam sebuah acara berita Indepth dengan topik Main Serobot Trotoar. Dalam berita Indepth yang diberitakan oleh Michael (2017) sebagai presenter, dikatakan bahwa pengendara bermotor roda dua paling mendominasi dalam melanggar peraturan di atas trotoar selain dari PKL. Salah satu pengendara sepeda motor dan merupakan driver dari salah satu ojek online, Bapak Bejo yang tertangkap dan ditilang oleh Polri di Jalan Mangga Besar Raya menjelaskan bahwa ia mengetahui betul bahwa tindakannya salah, namun menganggap bahwa dirinya tidak mengganggu aktivitas para pejalan kaki. Pada Bulan Agustus, Pemerintah menetapkan adanya BTT dengan bersama-sama mengajak Satpol PP, TNI, dan juga Polri dalam menertibkan trotoar dari

pihak-pihak yang menyalahgunakan fungsi trotoar. Berharap dengan adanya BTT ini, masyarakat lebih mempunyai kesadaran dan tidak bersikap sembrono akan fungsi trotoar yang diperuntukan untuk para pejalan kaki. Selain dari pengendara bermotor roda dua, yang menyalahgunakan trotoar juga adalah PKL dengan bentuk gerobak. Kepala Bidang Penegakkan dan Penindakan Hukum Pol PP, Budhi Novian mengatakan jika para pedagang jenis gerobak sudah melanggar aturan sebanyak tiga kali, maka akan ditindak secara tegas. Faktor-faktor utama yang menyebabkan adanya pengalihan fungsi trotoar adalah kesadaran masyarakat yang lemah dan struktur pembangunan trotoar. Pemerintah sudah melakukan pendekatan dengan masyarakat dalam proses pembangunan dan menertibkan trotoar, namun masyarakat tidak berintegrasi baik. Yayat Supriatna selaku Ahli Planologi Universitas Trisakti mengatakan, selama Pemerintah melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sepenggal-sepenggal, maka hasil perubahan yang didapat juga akan sepenggal-sepenggal, dan pejalan kaki perlu dimanusiakan.

Dari latar belakang tersebut, penulis mengupayakan sebuah kampanye sosial yang merujuk untuk mengembalikan fungsi trotoar yang nyaman dan aman untuk pejalan kaki dan tidak disalahgunakan kembali oleh para pengendara bermotor dan PKL. penulis akhirnya memutuskan untuk membuat laporan tentang “Perancangan Kampanye Sosial Pengembalian Fungsi Trotoar”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana merancang kampanye sosial untuk mengajak para pejalan kaki ikut berpartisipasi dalam mengembalikan fungsi trotoar?

### 1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan dalam latar belakang maupun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Segmentasi target:

a. Geografis: DKI Jakarta, yaitu Kota Tua, dan Tanah Abang

b. Demografis:

1.) Primer:

- Umur: 20-25 tahun, berdasarkan hasil wawancara yang didapat
- Jenis kelamin: pria dan wanita
- Psikografis: merasa terusik dengan pelanggar trotoar, kurang peduli/bersikap pasif terhadap pelanggar trotoar, bisa mengajak orang lain untuk ikut aktif melawan para pelanggar trotoar
- Tingkah laku: aktif berjalan kaki

2.) Sekunder:

Para pelanggar trotoar, yaitu PKL, juru parkir liar, dan pengendara bermotor roda dua dan empat

2. Memberikan pesan untuk meningkatkan kesadaran dalam berperilaku untuk menghormati pejalan kaki diatas trotoar

3. Kampanye sosial dirancang dengan menggunakan media utama yaitu *ambient* media, dan media pendukung lainnya

### 1.4. Tujuan Tugas Akhir

Merancang kampanye sosial untuk mengajak para pejalan kaki ikut berpartisipasi dalam mengembalikan fungsi trotoar.

### **1.5. Tujuan Khusus**

Tujuan perancangan kampanye sosial pengembalian fungsi trotoar adalah untuk memenuhi Tugas Akhir Program Studi Desain Komunikasi Visual sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Desain (S.Ds).

### **1.6. Manfaat Tugas Akhir**

Manfaat perancangan kampanye sosial pengembalian fungsi trotoar adalah untuk para pejalan kaki dapat memberikan ketegasan kepada pihak-pihak yang menyalahgunakan trotoar, dan dapat mengajak orang lain untuk mengembalikan fungsi trotoar.

